

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1963, pembukaan hubungan konsuler antar negara harus disetujui secara timbal balik (Pasal 2 ayat 1).¹ Persetujuan membuka hubungan diplomatik negara penerima dengan negara pengirim sudah termasuk persetujuan pembukaan hubungan konsuler, kecuali ada pernyataan khusus (ayat 2).² Berpijak pada aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat utama mengadakan hubungan konsuler adalah adanya persetujuan bersama (*mutual consent*) antara negara penerima dengan negara pengirim dan biasanya persetujuan bersama ini dituangkan dalam sebuah komunike bersama (*joint communique*).³

Tugas pokok mereka dalam kapasitas itu adalah melindungi kepentingan-kepentingan perdagangan negara yang mengangkatnya, akan tetapi umumnya sejumlah tugas tambahan lainnya dijalankan oleh mereka untuk kepentingan negaranya; misalnya, pelaksanaan akta-akta notaris, memberikan paspor, mengurus perkawinan-perkawinan dan melaksanakan yurisdiksi disipliner terhadap awak kapal yang dimiliki oleh negara yang diwakilinya.⁴

¹ Pasal 2 Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler

² Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Penerbit LaksBang Justitia, Surabaya, hlm. 193.

³ *Ibid*

⁴ Starke J.G, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 572.

Setiap warga negara yang mempunyai permasalahan hukum di negara penerima wajib mendapat pendampingan dari Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal yang sedang ditugaskan di wilayah tersebut dengan pemberitahuan melalui *Mandatory Access On Consular Notification*. Perjanjian tersebut sudah diatur dalam Konvensi Wina 1963 Pasal 36 mengenai komunikasi dan hubungan dengan warganegara-warganegara Negara pengirim.

Indonesia sudah memiliki perjanjian *Mandatory Access On Consular Notification* dengan negara Australia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Perjanjian ini dibuat agar Indonesia mendapat notifikasi dari WNI yang mendapat masalah.⁵ Pada tanggal 23 Oktober 2018 Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel-al Jubeir di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dibahas pentingnya perjanjian *Mandatory Access On Consular Notification* karena Indonesia belum mempunyai perjanjian tersebut dengan Arab Saudi sehingga Retno meminta agar kerajaan itu mempertimbangkan adanya perjanjian.⁶

Rencana perjanjian diatas mengenai pembenahan tata kelola penempatan Pekerja Migran Indonesia khususnya soal perlindungan dan peningkatan kesejahteraan karena banyak kasus menimpa pekerja migran di Arab Saudi, seperti pelecehan, kekerasan, pelecehan seksual, gaji yang tidak dibayar,

⁵ *Indonesia Tekan Arab Saudi Buat Perjanjian Notifikasi Konsuler*, dalam <https://www.medcom.id/internasional/dunia/ob3MoP5K-indonesia-tekan-arab-saudi-buat-perjanjian-notifikasi-konsuler> diakses pada tanggal 28 Februari 2019

⁶ *Pancung TKI Tanpa Pemberitahuan, Indonesia Protes Arab Saudi*, dalam <https://www.voaindonesia.com/a/pancung-tki-tanpa-pemberitahuan-indonesia-protes-arab-saudi-/4635891.html> diakses pada tanggal 28 Februari 2019

eksploitasi, ancaman hukuman mati yang mempengaruhi persepsi publik dan sifat perjanjian ini masih uji coba terbatas⁷, tidak hanya terbatas dengan perjanjian tersebut namun perlindungan warga negara juga diatur dalam Undang-Undang maupun Konvensi Wina yaitu :

1. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
2. Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri, dalam BAB V, yang mengatur perlindungan WNI oleh perwakilan RI di luar negeri.
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri.⁸

Adapun fungsi dari :

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) adalah untuk memberikan jasa pelayanan publik kepada warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah akreditasi KBRI yang meliputi Arab Saudi. Dalam kondisi tertentu, KBRI juga dapat memberikan jasa pelayanan publik kepada WNI yang sedang melakukan kunjungan singkat di wilayah Arab Saudi.

⁷ *Indonesia dan Arab Saudi teken perjanjian penempatan kerja*, dalam <https://www.aa.com.tr/id/dunia/indonesia-dan-arab-saudi-teken-perjanjian-penempatan-tenaga-kerja/1279566> diakses pada tanggal 9 April 2019

⁸ *Payung Hukum Perlindungan WNI di Luar Negeri*, dalam <https://www.medcom.id/internasional/asia/VNxBnBqk-5-payung-hukum-perlindungan-wni-di-luar-negeri> diakses pada tanggal 28 Februari 2019

2. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) adalah sebagai berikut.

- a. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga pengirim yang tinggal di negara penerima baik pada individunya maupun badan hukum (badan usaha) dari individu tersebut dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional
- b. Meningkatkan kemajuan hubungan perdagangan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan antara negara pengirim dengan negara penerima, serta meningkatkan hubungan persahabatan antara negara penerima dengan negara pengirim sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Wina tahun 1963 ini.
- c. Mencari tahu dengan menggunakan segala cara yang dianggap sah menurut hukum internasional tentang perkembangan keadaan di negara penerima dalam bidang perdagangan, ekonomi, kebudayaan atau ilmu pengetahuan, kemudian melaporkannya pada negara pengirim dan memberitahukan kepada orang-orang yang berkepentingan atas informasi tersebut.
- d. Mengeluarkan passport dan dokumen perjalanan bagi warga negara dari negara penerima, dan visa atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan orang-orang yang ingin mengunjungi wilayah negara pengirim.

- e. Memberi bantuan dan pertolongan pada warga negara pengirim yang ada di negara penerima baik pada individunya maupun pada badan usaha milik mereka.
- f. Bertindak sebagai notaris dan pejabat catatan sipil atau melaksanakan fungsi administratif yang sejenis dengan notaris dan pejabat catatan sipil, sepanjang hal dan aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan hukum negara penerima.
- g. Menjaga dan menjamin keselamatan seluruh warga negara pengirim yang ada di negara penerima baik terhadap individunya maupun pada badan hukum-badan hukum milik mereka bila terjadi “suksesi moris causa” dalam wilayah negara penerima sepanjang hal tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan negara penerima.
- h. Menjaga kepentingan-kepentingan anak-anak yang masih ada dibawah umur (belum dewasa) dan orang-orang yang tidak berkemampuan penuh (orang tidak cakap hukum) dalam melakukan tindakan hukum, sepanjang mereka berstatus warga negara pengirim dan tinggal di negara penerima terutama dalam berkaitnya dengan perlindungan dan perwalian dengan kebutuhan orang-orang yang bersangkutan, dengan syarat bahwa hal tersebut masih dalam batas-batas yang dianggap wajar oleh negara penerima.
- i. Tunduk pada praktik dan prosedur yang berlaku di negara penerima atau aturan tentang perwalian yang layak bagi warga negara pengirim

yang ada di negara penerima dihadapan pengadilan atau alat-alat negara penerima lainnya demi mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara penerima, terutama yang berkenaan dengan tindakan-tindakan sementara atau hak-hak dan kepentingan-kepentingan warga negara pengirim yang tinggal di negara penerima, tentu saja jika mereka tidak hadir di pengadilan atau karena alasan-alasan lain yang disebabkan oleh ketidakcakapan orang-orang tersebut untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya sendiri.

- j. Meneruskan dokumen yudisial dan ekstrapudisial atau membuat surat-surat permohonan atau juga melaksanakan perbuatan-perbuatan untuk mengambil barang bukti yang diperlukan pengadilan negara penerima sesuai dengan perjanjian internasional yang berlaku, atau jika tidak ada perjanjian internasional yang mengatur hal tersebut maka pelaksanaannya didasarkan pada cara-cara lain yang selaras dengan hukum dan peraturan negara penerima.
- k. Melaksanakan pengawasan dan/atau pemeriksaan yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan negara penerima atas kapal-kapal yang berkebangsaan negara pengirim, dan pesawat-pesawat terbang yang didaftarkan pada negara pengirim, dan juga terhadap awak kapal dan awak pesawat yang terkait.

- l. Memberikan bantuan pada kapal-kapal yang berkebangsaan negara pengirim dan pesawat-pesawat yang didaftarkan di negar pengirim termasuk kepada awak pesawat dan kapal yang bersangkutan; mengeluarkan pernyataan-pernyataan mengenai pelayaran; memeriksa dan mengesahkan surat-surat kapal dan pesawat negara pengirim dengan tanpa menyebabkan kerugian pada penguasa negara penerima yang berwenang; mengadakan penyelidikan pada kecelakaan yang terjadi dalam pelayaran atas kapal-kapal yang berkebangsaan negara pengirim di wilayah negara penerima, sekaligus menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara pejabat negara penerima yang berwenang di pelabuhan dengan nahkoda kapal dan pelaut yang berkewarganegaraan negara pengirim sepanjang hukum nasional negara penerima memperbolehkan tindakan tersebut.
- m. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dipercayakan oleh negar pengirim pada perwakilan konsuler sepanjang hal tersebut diperkenankan oleh hukum dan peraturan negara penerima, atau didasarkan pada perjanjian bilateral antara negara penerima dengan negara pengirim.⁹

⁹ Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Penerbit Laksbang Justitia, Surabaya, hlm. 37.

3. Konsuler Republik Indonesia adalah

- a. Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;
- b. Melindungi kepentingan nasional negara dan warganegara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan pengamatan, penilaian dan pelaporan;
- d. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warganegara Republik Indonesia yang berada di wilayah kerjanya;
- e. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi, dan persandian;.
- f. Melaksanakan urusan tatausaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga perwakilan konsuler.¹⁰

Pada tanggal 14 April 2015 pemerintah Arab Saudi melakukan eksekusi mati terhadap WNI yang bernama Siti Zaenab karena terbukti bersalah membunuh istri dari pengguna jasanya yang bernama Nourah Bt. Abdullah Duhem Al Maruba pada tahun 1991.¹¹

¹⁰ AK Syahmin, 1988, *HUKUM DIPLOMATIK Suatu Pengantar*, Penerbit CV. ARMICO, Bandung, hlm. 116.

¹¹ 16 Tahun Memohon Ampun, TKI Siti Zaenab Dieksekusi Mati di Arab Saudi, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2015/04/15/00452961/16.Tahun.Memohon.Ampun.TKI.Siti.Zaenab.Dieksekusi.Mati.di.Arab.Saudi> diakses pada tanggal 28 Februari 2019

Konfirmasi eksekusi ini disampaikan ke Kementerian Luar Negeri yang mendapat informasi dari pengacara Siti Zaenab namun informasi ini diberikan paska eksekusi dilakukan sehingga Pemerintah Indonesia menyampaikan protes terhadap Pemerintah Arab Saudi karena tidak menyampaikan notifikasi kepada Perwakilan RI maupun keluarga korban mengenai pelaksanaan eksekusi, sehingga Perwakilan RI tidak dapat melakukan pendampingan terhadap Siti Zaenab sebelum dieksekusi.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk melepaskan Siti Zaenab dari jerat hukumannya mulai dari upaya diplomatik oleh tiga Presiden RI yakni Abdurrahman Wahid (2000), Susilo Bambang Yudhoyono (2011), dan Joko Widodo (2015) dengan cara mengirimkan surat permohonan agar Raja Arab Saudi untuk memberikan maaf terhadap WNI tersebut namun tidak membuahkan hasil, proses eksekusi Siti Zaenab tetap dilanjutkan tanpa adanya notifikasi terhadap Pemerintah Indonesia.

Kabar duka kembali datang dari Arab Saudi, setelah Siti Zaenab seorang Tenaga Kerja Indonesia asal Brebes, Jawa Tengah bernama Karni bin Medi Tarsim dieksekusi oleh pemerintah Arab Saudi tanpa notifikasi terhadap pemerintah Indonesia. Karni adalah TKI yang bekerja pada majikan bernama Khalid Faiz al-Syihri di Kota Yanbu, Arab Saudi. Awal mulanya pada Rabu 26 September 2012, Karni telah membunuh anak majikannya yang berumur 4 tahun. Pada saat kejadian telah ditemukan pisau di samping jasad anak majikannya.

Pemerintah Indonesia sudah berupaya membantu dengan menyediakan pendampingan hukum dengan menggunakan pengacara Kudra di Arab Saudi. Namun pada 17 Maret 2013, Karni bin Medi divonis hukuman *qishas* oleh Hakim Mahkamah Umum di Yanbu. Pemerintah melalui Dubes RI telah berupaya menemui keluarga korban, namun pihak keluarga tetap tidak mau berkomunikasi. Dubes RI dan KJRI di Arab Saudi telah berusaha memberikan perhatian dan bantuan pendampingan secara berkala baik pada saat sidang di pengadilan maupun kunjungan ke penjara. Pemerintah Indonesiapun tidak dapat notifikasi pemberitahuan terlebih dahulu dari Arab Saudi kepada Pemerintah RI sebelum dilakukan eksekusi mati terhadap TKI asal Brebes tersebut.¹²

Pemerintah Arab Saudi melaksanakan eksekusi hukuman mati terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Mochammad Zaini Misrin (47), pria asal Madura itu menambah daftar panjang Warga Negara Indonesia (WNI) yang dieksekusi Pemerintah Arab Saudi. Zaini Misrin merantau ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai sopir pribadi pada 1992. Ia sempat kembali ke Tanah Air sebelum akhirnya kembali ke negara tersebut pada tahun 1996. Pada tahun 1996 berangkat untuk kedua kalinya dan bekerja pada majikan yang sama, ungkap Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal di Kantor Kemenlu RI, Jakarta.¹³

¹² *Setelah Zaenab, Karni binti Medi Dieksekusi Mati di Arab Saudi* dalam <https://www.liputan6.com/news/read/2215086/setelah-zaenab-karni-binti-medi-dieksekusi-mati-di-arab-saudi> diakses pada 14 April 2019

¹³ *Ibid*

Pada 13 Juli 2004, Misrin ditangkap dan ditahan atas tuduhan membunuh majikannya, Abdullah bin Umar Muhammad Al Sindy. Misrin dilaporkan anak kandung korban kepada aparat kepolisian setempat. Setelah ditahan kurang lebih empat tahun, Misrin divonis hukuman mati "qisos" pada 17 November 2008. Qisos berarti memberi hukuman yang setimpal, di mana pelaku kejahatan dibalas serupa dengan perbuatannya. Pemerintah Indonesia baru tahu tentang status hukum Zaini Misrin ketika pengadilan telah menjatuhkan vonis mati. "November 2008 Mahkamah Umum Mekah menetapkan keputusan hukuman mati *qisas* bagi Zaini Misrin," kata Iqbal.¹⁴

Pemerintah Indonesia telah menunjuk pengacara untuk mendampingi Zaini Misrin. Pertama pada awal tahun 2017 melalui kuasa hukumnya, pemerintah telah mengajukan dua permohonan Peninjauan Kembali (PK) namun ditolak. Kedua pada tanggal 29 Januari, Pada 20 Februari 2018, Zaini Misrin punya secercah harapan ketika Jaksa Agung Riyadh mempersilakan pengacara untuk mendapatkan kesaksian dari penerjemah kliennya saat dilakukan BAP pada 2004. Akan tetapi, belum juga mendapatkan kesaksian untuk memperkuat PK tersebut, Zaini Misrin justru langsung dieksekusi mati. Ia dipancung di tengah proses permohonan PK keduanya yang masih berjalan. Eksekusi yang dilakukan setelah Misrin ditahan selama kurang lebih 13 tahun.

Pemerintah Indonesia tidak mendapatkan notifikasi pemberitahuan sebelum pelaksanaan eksekusi hukuman pancung dilakukan. Padahal, selama ini, kedua

¹⁴ *Kisah Perantauan Zaini Misrin yang Berakhir di Tangan Algojo Arab Saudi*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/20/06331931/kisah-perantauan-zaini-misrin-yang-berakhir-di-tangan-algojo-arab-saudi?page=all> diakses pada 15 April 2019

negara punya hubungan baik yang telah terjalin berpuluh-puluh tahun. Seharusnya, Pemerintah Arab Saudi memberi notifikasi kepada Indonesia terlebih dulu. Meski demikian, Indonesia tak bisa melakukan upaya apapun atas kebijakan sepihak yang dilakukan Arab Saudi. Tak ada aturan yang mengharuskan Arab Saudi memberitahukan pelaksanaan eksekusi itu.¹⁵

Presiden Indonesia pun telah berulang kali mengirimkan surat kepada Raja Arab Saudi, Raja Salman agar kasus Zaini Misrin ditinjau kembali. Eksekusi itu dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (*Mandatory Access On Consular Notification*) kepada pemerintah Indonesia. Tidak berselang jauh hari dari eksekusi Zaini Misrin, eksekusi mati terjadi kembali pada 29 Oktober 2018 yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi terhadap TKI dengan Tuduhan pembunuhan. Kali ini TKI asal Majalengka, Jawa Barat yang menjadi objek eksekusi. Sama sepertiga eksekusi sebelumnya, eksekusi Tuti Tursilawati juga dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada Pemerintah Indonesia.

Tuti Tursilawati ditangkap kepolisian Arab Saudi pada 12 Mei 2010 atas tuduhan membunuh ayah majikannya, Suud Mulhaq Al Ataibi. Tuti Tursilawati ditangkap sehari setelah kejadian pembunuhan. Sejak ditangkap dan ditahan pihak kepolisian, Konsulat Jenderal RI Jeddah melalui satgasnya di Thaif, Said Barawwas, memberikan pendampingan dalam proses investigasi awal di kepolisian kemudian Said Barawwas juga mendampingi proses investigasi lanjutan di Badan Investigasi.

¹⁵ *Ibid*

Selama proses investigasi, Tuti Tursilawati Tursilawati mengakui membunuh ayah majikannya, Ia beralasan sering mendapatkan pelecehan seksual dan kekerasan, yang dilakukan Tuti Tursilawati merupakan pembelaan diri.¹⁶ Meskipun pemerintah terus mengupayakan pembebasan Tuti Tursilawati dari ancaman hukuman mati, namun kasus seperti Tuti Tursilawati akan sulit dibuktikan sebagai pembelaan diri karena pembunuhan yang ia lakukan menggunakan kayu untuk memukul majikannya hingga meninggal dunia, dianggap telah dipersiapkan sejak awal. Staff KJRI Jeddah, yang baru menerima pemberitahuan setelah eksekusi mati dilaksanakan, ikut meshalahkan jenazah dan menyaksikan pemakaman Tuti Tursilawati.¹⁷

Peran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi sangat aktif dibandingkan dengan peran Kedutaan Besar Republik Indonesia lainnya, tidak hanya menerima aduan WNI yang sedang berada disana namun terdapat urusan lain yaitu hubungan bilateral antara Indonesia-Arab Saudi dari masalah tenaga kerja sampai kuota haji, dengan memiliki semboyan “satu tim satu mimpi”. Kedutaan Besar maupun para staf mengoptimalkan memberikan perlindungan terhadap WNI yang tinggal disana terutama bagi para tenaga kerja indonesia

¹⁶ *Kronologi Kasus TKI Tuti Tursilawati hingga Dieksekusi Mati*, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-Tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-mati/full&view=ok> diakses pada 15 April 2019

¹⁷ *Arab Saudi Jatuhkan Hukuman Mati kepada Tuti Tursilawati yang Tidak Bisa Diampuni*, dalam <http://wartakota.tribunnews.com/2018/10/31/arab-saudi-jatuhkan-hukuman-mati-kepada-tuti-tursilawati-yang-tidak-bisa-diampuni> diakses pada 15 April 2019

bahkan harus bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk membebaskan para tenaga kerja indonesia dari ancaman hukuman mati.¹⁸

Tidak hanya Kedutaan Besar Republik Indonesia saja yang berperan dalam memberikan perlindungan WNI yang berada di Arab Saudi namun Konsulat Jenderal Republik Indonesia ikut berperan di dalamnya. Memberikan pelayanan terpadu terhadap WNI yang berada di Arab Saudi seperti ; mengurus dokumen pemutihan izin tinggal, memberikan perlindungan terhadap WNI yang diperlakukan tidak manusiawi oleh majikannya, kerja sama pemberian beasiswa, pengiriman tenaga ahli,dll. Semua dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan bagi WNI yang tinggal di Arab Saudi.

Pelayanan bagi WNI di Arab Saudi lebih dimudahkan dengan adanya Aplikasi I-KJRI yaitu layanan informasi berbasis Android dan IOS diluncurkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah. Aplikasi ini untuk memudahkan pelayanan dan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang berada di Arab Saudi. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari KJRI Jeddah Mobile yang telah diluncurkan 10 November 2016 silam dan melengkapi aplikasi sebelumnya yang juga telah hadir yakni *SMS Gateway* dan *WhatsApp Gateway*.

Aplikasi yang terdiri atas tiga bahasa, yaitu Indonesia, Arab dan Inggris ini diperkenalkan kepada WNI yang berdomisili di Kota Madinah dalam acara Diseminasi Kewarganegaraan dan Keimigrasian yang berlangsung di Wisma Haji Indonesia, Madinah, Selasa malam pada tanggal 20 November. Aplikasi ini

¹⁸ Agus: *Kedutaan Besar Republik Indonesia di Arab Saudi Tersibuk*, dalam <https://dunia.tempo.co/read/1061668/agus-kedutaan-besar-republik-indonesia-di-arab-saudi-tersibuk> diakses pada 15 April 2019

menyajikan ragam informasi layanan kekonsuleran (seperti legalitas dan terjemahan dokumen dan penerbitan dokumen), keimigrasian (permohonan paspor RI, Surat Perjalanan Laksana Paspor, permohonan visa, pendaftaran dan permohonan fasilitas keimigrasian anak kewarganegaraan ganda, biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Juga soal ketenagakerjaan (perjanjian kerja, *demand letter/job order*) dan penerangan, sosial dan budaya/Pensosbud (surat keterangan pindah sekolah). "Ingin berinteraksi dalam konsultasi atau menyampaikan pengaduan via email dan mendapatkan panduan lokasi, alamat maupun situs portal yang memuat berita dan kegiatan KJRI Jeddah, cukup mengunduh aplikasi i-KJRI Jeddah di google playstore untuk android, dan apple store bagi smartphone yang menggunakan sistem iOS," ujar Ismoyo.

Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin, menyatakan KJRI Jeddah berkomitmen untuk terus berinovasi menghadirkan kemudahan, kenyamanan, keramahan dan keamanan dalam pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat. Hal ini terkait upaya mendukung visi KJRI Jeddah sebagai laboratorium terlengkap praktek diplomasi perlindungan WNI di luar negeri, ujarnya.¹⁹

Sikap Arab Saudi yang otoriter mendapat banyak kecaman dari berbagai kalangan di dunia internasional karena sikapnya yang sering mengeksekusi dengan cara hukuman mati tanpa adanya pemberitahuan terhadap perwakilan

¹⁹ *I-KJRI Mudahkan Pelayanan bagi WNI di Arab Saudi*, dalam <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/147646/i-kjri-jeddah-mudahkan-pelayanan-bagi-wni-di-arab-saudi> diakses pada 22 Mei 2019

diplomatik, sikapnya yang tidak pernah melihat Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang devisa negara (ke Arab Saudi) dari haji dan umrah.

Negara mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang dan perbuatan yang ada di teritorialnya. Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa negara dapat menggunakan kedaulatan itu seenaknya sendiri. Hukum internasional telah mengatur bahwa di dalam kedaulatan terkait di dalamnya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Karenannya, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan atau kelalaiannya yang melawan hukum.²⁰

Tanggung jawab negara merupakan hal yang fundamental di dalam hukum internasional yang timbul dari sistem hukum internasional dan doktrin. Setiap negara yang melanggar hukum internasional terhadap negara lain, hukum internasional tetap harus ditegakan diantara kedua belah pihak negara. Pelanggaran terhadap hukum internasional menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi.²¹

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah :

Apakah tindakan pemerintah Arab Saudi yang tidak memberi tahu Perwakilan RI di Arab Saudi tentang WNI yang mempunyai

²⁰ Sefriani, 2018, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 253.

²¹ Shaw, 1995, *International Law: Second Edition*, Published by the Press Syndicate of Cambridge, Australia, page 481.

permasalahan hukum bertentangan dengan kewajiban melakukan
Mandatory Access On Consular Notification?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yaitu :

Untuk mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi bertentangan dengan fungsi dan kewajiban melakukan *Mandatory Access On Consular Notification*

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat menjadi bahan kajian betapa pentingnya *Mandatory Access On Consular Notification* dalam memberi perlindungan terhadap WNI yang mendapat masalah hukum di Arab Saudi.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi WNI yang berada di luar negeri yang sedang mendapat masalah hukum dan juga sebagai referensi mahasiswa lainnya

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian hukum atau skripsi dengan judul “Arti Penting *Mandatory Access On Consular Notification*” merupakan karya ilmiah asli penulis bukan plagiasi. Berikut penulis memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi yang hamper sama atau terkait dengan penulisan ini, antara lain :

1. Nama : Nurul Fauziah Said (Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya)

Judul : *Mandatory Consular Notification* Sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Rumusan Masalah

Akan diteliti mengenai :

- a. Kedudukan MACN dalam hubungan diplomatik antar negara
- b. Upaya pemerintah Indonesia melindungi TKI melalui MACN

Kesimpulan

MACN merupakan suatu kesepakatan timbal balik antar dua negara yang mengatur tentang penanganan permasalahan yang dihadapi oleh WNI dalam bentuk notifikasi konsuler. Kedudukan MACN sama halnya dengan notifikasi konsuler yang diatur dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, akan tetapi MACN bersifat *mandatory* atau semakin memperkuat kewajiban negara dalam pelaksanaan notifikasi konsuler terhadap negara lainnya.

2. Nama : Resanora Ayu Garcia (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Judul : Peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia Dalam Menghadapi Permasalahan Warga Negara Indonesia Yang *Overstay* di Saudi Arabia

Rumusan Masalah

Bagaimana Peranan Perwakilan Diplomatik Indonesia Dalam Melindungi Warga Negara Indonesia Yang *Overstay* di Saudi Arabia?

Kesimpulan

Faktor utama penyebab Warga Negara Indonesia tinggal di Saudi Arabia adalah faktor ekonomi karena kebanyakan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau melakukan ibadah Umrah sehingga harus menetap di sana. Peranan Perwakilan Diplomatik dalam melindungi Warga Negara Indonesia di Saudi Arabia sangatlah penting, sudah diatur dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 3 mengenai Hubungan Diplomatik bahwa satu fungsi peraturan diplomatik ialah melindungi kepentingan dari warga negara pengirim di negara penerima dan Perwakilan Diplomatik Indonesia harus menghargai dan tidak ikut campur terhadap hukum dan kebijakan di Saudi Arabia.

3. Nama : Chairiah Ulfa (Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan)

Judul : Peranan Kementrian Luar Negeri Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tinjauan umum tentang Kementerian Luar Negeri?
- b. Bagaimana perkembangan tenaga kerja Indonesia di Saudi Arabia?
- c. Bagaimana peranan Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam menangani masalah hukum yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia?

Kesimpulan

Sistem hukum Negara di Indonesia tidak dapat berlaku dalam menangani permasalahan hukum yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia, harus disesuaikan dengan hukum di Saudi Arabia, oleh karena itu harus dapat menjalankan tugasnya untuk memberikan jaminan penuh dan perlindungan HAM kepada setiap warga negaranya.

F. BATASAN KONSEP

Dalam penulisan hukum ini akan dibatasi definisi konsep-konsep yang akan digunakan dalam skripsi ini, antara lain :

1. *Mandatory Access on Consular Notification*

Yang dimaksud *Mandatory Access on Consular Notification* yaitu pemberitahuan secara formal mengenai peristiwa kepada konsuler dan pendampingan yang dilakukan oleh konsuler terhadap Warga Negaranya yang sedang mengalami tindak pidana.

2. Perlindungan

Tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi²², melindungi semua Warga Negara Indonesia yang sedang berada di negara penerima dengan cara memberikan bantuan hukum melalui perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia maupun Konsuler.

3. Warga Negara Indonesia (WNI)

Yang dimaksud Warga Negara Indonesia (WNI) yaitu yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.²³

4. Arab Saudi

Yang dimaksud Arab Saudi yaitu merupakan salah satu negara penghasil dan pengeksport minyak terbesar di Dunia yang berada di kawasan Asia Barat Daya (kawasan Timur Tengah). Negara yang mencakup hampir seluruh semenanjung Arabia dan memiliki nama lengkap Kingdom of Saudi Arabia

²² <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada tanggal 22 Februari 2019

²³ Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

(Kerajaan Arab Saudi) ini memiliki luas wilayah sebesar 2.149.690 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 28.571.770 jiwa (data 2017). Mayoritas penduduknya adalah etnis Arab yang beragama Islam. Bahasa resmi Arab Saudi adalah bahasa Arab.

Secara geografis, Arab Saudi terletak di antara 15°LU – 32°LU dan antara 34°BT – 57°BT dan berbatasan dengan Irak, Kuwait dan Yordania di sebelah Utaranya. Disebelah Selatan, Arab Saudi berbatasan dengan Republik Yaman dan Kesultanan Oman sedangkan di sebelah Timurnya adalah Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain dan Teluk Persia. Sebelah Barat Arab Saudia adalah Laut Merah.

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Arab Saudi adalah sistem pemerintahan Monarki Absolut yaitu sistem pemerintahan yang kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang Raja. Ibukota Arab Saudi adalah Riyadh. Kerajaan Arab Saudi merupakan negara anggota PBB, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), G-20 dan OPEC.²⁴

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

²⁴ <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-arab-saudi-saudi-arabia/> diakses pada tanggal 22 Februari 2019

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah sumber data sekunder yang berupa:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan RI Di Luar Negeri.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet (*website*) yang bertujuan untuk mencari data yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni Arti Penting *Mandatory on Access Consular Notification* Dalam Memberi Perlindungan WNI Di Arab Saudi Ditinjau Dari Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, dan Kamus

Bahasa Inggris-Indonesia yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder yang terkait dengan penelitian yang dilakukan
- b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan maupun tertulis sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai hal-hal yang akan diteliti, dengan narasumber Ibu Marisa selaku Kepala Seksi Perlindungan WNI dan BHI dari Kementerian Luar Negeri.

4. Analisis Data

Dalam melakukan pengolahan data terhadap data yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisi, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari dan proses penalaran. Penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu mendasarkan pada pola pemikiran umum ke pemikiran yang lebih khusus.

H. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep berupa konsep tentang Arti Penting *Mandatory Access On Consular Notification* Dalam Memberi Perlindungan WNI Di Arab Saudi Ditinjau Dari Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai Arti Penting *Mandatory Access On Consular Notification* Dalam Memberi Perlindungan WNI Di Arab Saudi. Penulis menjabarkan lagi hal tersebut menjadi 3 sub bahasan, yakni;

- A. Tinjauan tentang *Mandatory Access On Consular Notification*
- B. Tinjauan tentang Memberi Perlindungan WNI
- C. Hasil penelitian tentang Arti Penting *Mandatory Access On Consular Notification*

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang berasal dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan

